

30.f.B

Sumber daya yang mendukung keberlanjutan Inovasi Pelayanan Publik.

0. Belum ada sumber daya yang mendukung keberlanjutan inovasi.
1. Sumber daya yang mendukung keberlanjutan inovasi dalam bentuk rancangan payung hukum.
2. Sumber daya yang mendukung keberlanjutan inovasi dalam bentuk payung hukum.
3. Sumber daya yang mendukung keberlanjutan inovasi dalam bentuk payung hukum dan 1 kondisi lainnya.
4. Sumber daya yang mendukung keberlanjutan inovasi dalam bentuk payung hukum dan 2 kondisi lainnya.
5. Sumber daya yang mendukung keberlanjutan inovasi dalam bentuk payung hukum dan 3 kondisi lainnya.

Bukti Dukung

Foto Bentuk Pelembagaan Inovasi

Pelembagaan Inovasi Dukungan kebijakan :
Payung hukum terkait inovasi;

1. **Anggaran** : Dokumen penganggaran;
2. **Sarana dan prasarana** : Foto sarana prasarana pendukung inovasi;
3. **Sumber Daya Manusia** : SK perorangan dan/atau tim yang menginisiasi penciptaan inovasi.



BUPATI BANYUWANGI
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 42 TAHUN 2013
TENTANG
PELAYANAN PENGURUSAN AKTA KELAHIRAN SECARA ON LINE
DI KABUPATEN BANYUWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil khususnya pelayanan pengurusan Akta Kelahiran di Kabupaten Banyuwangi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Pengurusan Akta Kelahiran secara On Line di Kabupaten Banyuwangi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);